

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- , 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta Tanah*, Karya Media, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Schaffmeister, dkk, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soesilo, R, 1976, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.
- Sofyan, Andi dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi:

Hadli, “Penggunaan Hak Ingkar Oleh Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 106/ PID B/ 2009/ PN. P1. R)”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

Harsono, Boedi, 2007, “PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya”, *Majalah Renvoi*, No.8.44.IV, Jakarta.

Lestari, Dwi, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Pitasari, Yakti Deasy, “Penggunaan Hak Ingkar Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemberian Kesaksian Di Muka Pengadilan”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Tobing, G.H.S.L, 1999, “Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP”, *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya.

Winarsi, Sri, “Pengaruh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum”, *Majalah Yuridika*, Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.